

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendekatan arsitektur perilaku menitikberatkan pada keterkaitan timbal balik antara ruang dan perilaku manusia yang menggunakannya. Dalam konteks ruang kerja pemerintahan, ruang bukan sekadar wadah aktivitas administratif, tetapi juga berperan sebagai sistem sosial yang memengaruhi pola interaksi serta dinamika kerja di dalamnya. Haryadi dan Setiawan (2020) menyatakan bahwa ruang memiliki kemampuan untuk membentuk perilaku manusia, sekaligus dipengaruhi kembali oleh cara pengguna memaknai dan menggunakan ruang tersebut. Fenomena ini terlihat nyata di lingkungan Kantor Bupati Aceh Barat Daya, di mana para pegawai melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap ruang kerja yang tersedia.

Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa pegawai kerap mengatur ulang posisi meja dan kursi demi kenyamanan, memanfaatkan area kerja untuk menyimpan makanan dan barang pribadi, serta melakukan interaksi sosial secara spontan di dalam ruang kerja. Perilaku lainnya termasuk duduk dalam posisi non-formal, penggunaan perangkat kerja yang fleksibel, hingga penumpukan dokumen akibat keterbatasan ruang penyimpanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola perilaku pengguna kerap tidak selaras dengan desain ruang yang telah direncanakan. Sundstrom (1986) menekankan bahwa ketidaksesuaian antara rancangan ruang dan aktivitas kerja dapat berdampak negatif terhadap kenyamanan dan produktivitas. Sementara itu, Heerwagen et al. (2004) menambahkan bahwa lingkungan kerja yang dirancang dengan mempertimbangkan perilaku pengguna dapat mendorong kesejahteraan psikologis, efisiensi kerja, dan interaksi sosial yang sehat. Oleh sebab itu, diperlukan kajian arsitektur perilaku untuk memastikan bahwa ruang kantor mampu mewadahi aktivitas nyata pengguna dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif serta manusiawi.

Kantor Bupati merupakan bangunan pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan simbol identitas daerah. Dalam perannya sebagai institusi pemerintahan daerah, kantor ini menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pengelolaan, pengawasan, serta koordinasi dalam sistem pemerintahan otonom. Secara arsitektural, bangunan kantor Bupati umumnya dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan fungsional dan perilaku penggunanya, terutama dalam konteks kerja birokratis yang formal. Aceh Barat Daya merupakan kabupaten di Provinsi Aceh yang berpusat di Blangpidie. Sebelum dimekarkan, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan, hingga akhirnya ditetapkan sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2002. Di lingkungan Kantor Bupati Aceh Barat Daya, terdapat sejumlah unit dan ruang kerja yang meliputi Ruang Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Bagian Organisasi, Pemerintahan Umum, Perekonomian dan SDA, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Administrasi Pembangunan, Organisasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta bagian Umum, Keuangan, Kesra, termasuk juga ruang tunggu, mushola, dan toilet. Suasana kerja di dalam kantor ini umumnya bersifat formal, mencerminkan nuansa profesional yang ditunjang oleh desain interior yang sederhana namun elegan. Interaksi antarpegawai berlangsung dengan tertib, mencerminkan budaya kerja yang disiplin dan terstruktur.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji penerapan arsitektur perilaku dalam konteks yang beragam. Kadeli (2018), misalnya, menerapkan pendekatan ini pada pusat komunitas jalanan yang mengusung konsep pengembangan keterampilan kewirausahaan dan seni, dengan tujuan menciptakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan perilaku anak jalanan demi kenyamanan fisik dan psikologis. Fakriah (2019) mengembangkan rancangan sekolah ramah anak melalui pendekatan arsitektur perilaku yang diterapkan dalam desain infrastrukturnya.

Tirta (2020) menyoroti interaksi antara pedagang dan pembeli di lingkungan pasar, yang memengaruhi aspek sosialitas, aktivitas, aksesibilitas, dan kontrol ruang. Studi lainnya dilakukan oleh Suwandi (2021), yang meninjau keterkaitan antara kebutuhan perilaku pengguna dan desain unit hunian vertikal, termasuk sarana dan prasarana yang tersedia. Andriani (2022) mengkaji pemanfaatan ruang dosen yang intensif, hingga menyebabkan berkurangnya ruang personal, munculnya tekanan sensorik, dan berujung pada crowding yang berdampak pada mobilitas dosen dalam bekerja. Sementara itu, Prasetyo (2023) menekankan pentingnya elemen sirkulasi, warna, pencahayaan alami, dan akustik dalam mendukung kenyamanan dan produktivitas di gedung perkantoran kawasan industri. Dari berbagai temuan tersebut, tampak bahwa kajian arsitektur perilaku telah banyak dilakukan dalam ranah pendidikan, komunitas, hunian, dan perkantoran umum. Namun, penelitian yang secara khusus menelaah hubungan antara pola ruang dan perilaku pengguna di lingkungan kantor pemerintahan, terutama pada bangunan Kantor Bupati, belum banyak dikaji secara mendalam. Dengan demikian, studi ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji pola ruang dan aktivitas pengguna di Kantor Bupati Aceh Barat Daya melalui pendekatan arsitektur perilaku.

Penelitian ini berfokus pada tiga ruang kerja yang menjadi objek kajian di Kantor Bupati Aceh Barat Daya yang dinilai memiliki Kendala dalam penataan ruang dan kenyamanan kerja, yaitu: Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Administrasi Pembangunan. Ketiga ruang ini menunjukkan pola sirkulasi yang kurang optimal, penataan furnitur yang tidak efisien, serta luas ruang yang tidak proporsional terhadap jumlah pengguna, yang secara keseluruhan berdampak pada kenyamanan dan produktivitas kerja. Di ruang Bagian Umum, keterbatasan kapasitas ruang menjadi isu utama, di mana jumlah pengguna tidak sebanding dengan luas ruangan. Ruang ini juga memiliki pola berbentuk huruf L akibat adanya subruang di dalam ruang utama, yang berdampak pada terhambatnya sirkulasi dan

komunikasi antar staf. Selain itu, penempatan furnitur yang tidak tepat mempersempit jalur pergerakan. Ruang Bagian Organisasi menunjukkan pola ruang menyerupai huruf Z dengan arah sirkulasi yang tidak linier. Konfigurasi ini mengakibatkan pergerakan pengguna menjadi kurang fleksibel dan menghambat interaksi antar bagian, sehingga mengurangi efisiensi hubungan ruang dalam satu unit kerja. Sementara itu, di ruang Bagian Administrasi Pembangunan, tata ruang membentuk konfigurasi huruf L karena keberadaan sekat tambahan. Penempatan furnitur di ruangan ini tidak sepenuhnya mendukung aktivitas kerja, sehingga membatasi ruang gerak pegawai. Pemilihan ketiga ruang tersebut didasarkan pada urgensi untuk memahami bagaimana desain ruang kantor yang tidak sesuai dapat berdampak langsung pada efektivitas kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perancangan ruang kerja yang lebih adaptif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan aktivitas pengguna, khususnya di lingkungan strategis seperti Kantor Bupati.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memahami bagaimana perilaku pengguna ruang terbentuk dalam lingkungan kerja pemerintahan, penelitian ini memfokuskan kajian pada Kantor Bupati Aceh Barat Daya sebagai studi kasus. Pendekatan arsitektur perilaku digunakan untuk menelaah sejauh mana tata ruang fisik memengaruhi aktivitas dan interaksi para pegawai di dalam ruang kerja. Merujuk pada uraian latar belakang, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana arsitektur perilaku memengaruhi pola ruang dan aktivitas pengguna di Kantor Bupati Aceh Barat Daya.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang efisien, penting untuk memahami bagaimana desain arsitektur ruang berinteraksi dengan perilaku serta aktivitas pengguna dalam konteks kerja pemerintahan. Penelitian ini memfokuskan

kajian pada Kantor Bupati Aceh Barat Daya sebagai studi kasus untuk menelaah pengaruh tata letak ruang terhadap interaksi sosial, kenyamanan kerja, dan efektivitas aktivitas pegawai. Melalui pendekatan arsitektur perilaku, Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami sejauh mana keterkaitan antara pola ruang dan perilaku pengguna dalam konteks ruang kerja, serta menghasilkan rekomendasi desain yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna ruang. Oleh sebab itu, fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana arsitektur perilaku di Kantor Bupati Aceh Barat Daya memengaruhi pola ruang dan aktivitas penggunanya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kontribusi yang bermanfaat secara teori maupun praktik dalam memahami keterkaitan antara arsitektur perilaku dan pola ruang di lingkungan kantor pemerintahan, khususnya di Kantor Bupati Aceh Barat Daya. Dengan mengkaji perilaku pengguna serta interaksinya dengan ruang kerja, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan desain yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aktivitas pengguna. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

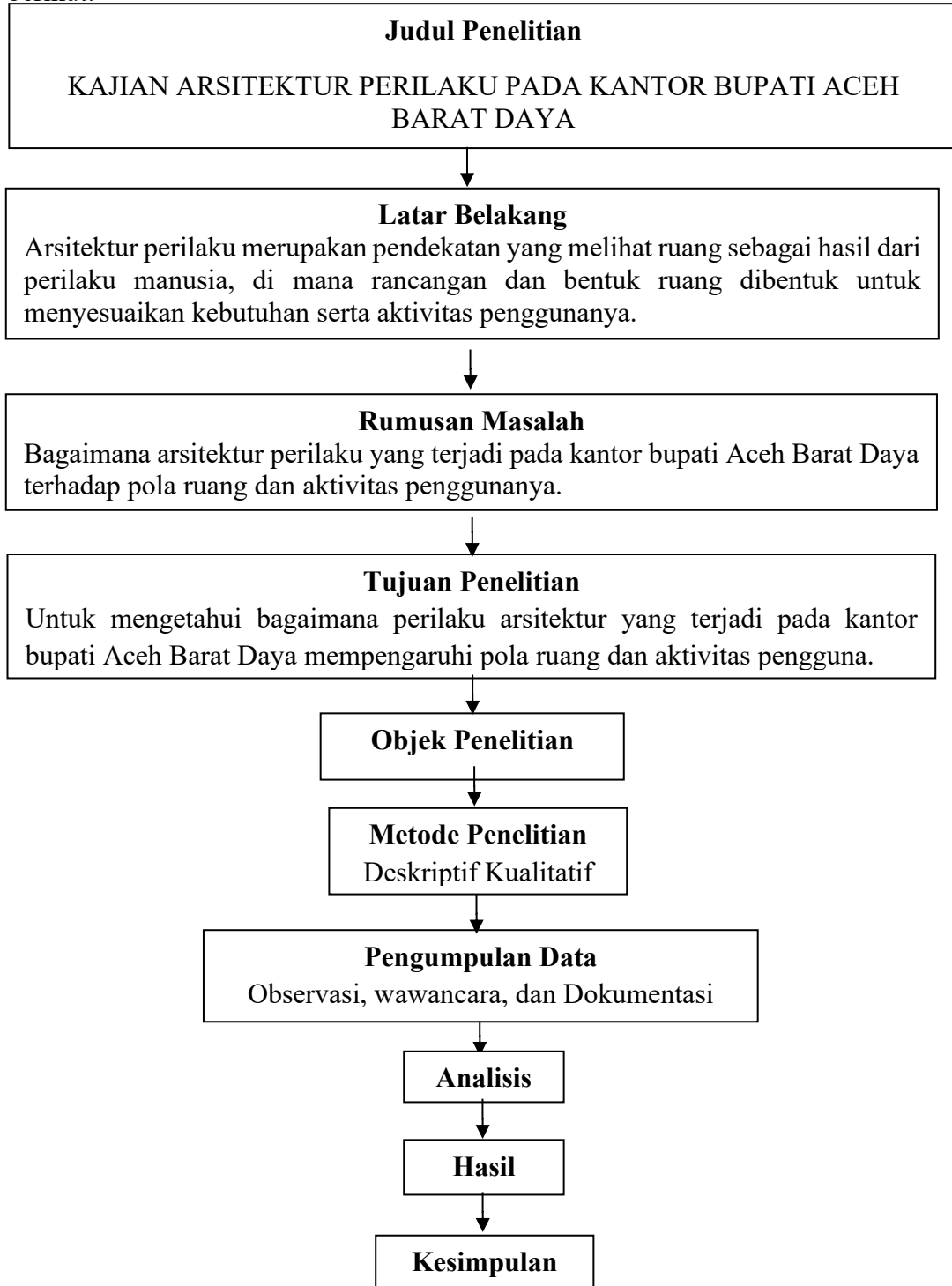
1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pola ruang dan perilaku pengguna di lingkungan kantor pemerintahan.
2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perancangan ruang kerja yang memperhatikan aspek perilaku dan kenyamanan pengguna.
3. Menjadi landasan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik aktivitas pengguna.
4. Memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai serta membantu dalam mengurangi stres dan menjaga kesehatan di tempat kerja.

1.5. Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus dan menghindari pelebaran pembahasan di luar konteks permasalahan utama, penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu agar pelaksanaannya lebih terarah dan sistematis. Objek yang dikaji adalah Kantor Bupati Aceh Barat Daya, dengan fokus utama pada kajian arsitektur perilaku terhadap pola ruang dan aktivitas pengguna di dalamnya. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek desain bangunan secara menyeluruh, melainkan hanya menelaah bagaimana perilaku pengguna ruang kerja berkaitan dengan tata letak dan konfigurasi ruang, khususnya pada beberapa unit kerja yang dipilih sebagai sampel studi.

1.6. Kerangka Pemikiran

Rangkaian proses penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka pemikiran berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian (Analisis Penulis, 2024)